

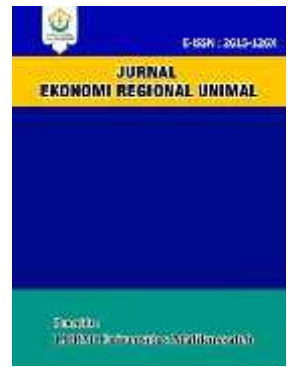
Analisis Determinan Pajak Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017

Rika Sukma^{*a}, Cut Putri Mellita Sari^{*b}

^{*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

^{*}Corresponding author: rikasukma96@gmail.com

cmellita0674@gmail.com



ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Keywords: *Economic Growth, Local Taxes and Government Expenditures*

This study aims to determine the effect of local taxes and government expenditures on economic growth in the North Aceh Regency. This study uses secondary data in the form of time series data in 2009-2017 obtained from the Central Bureau of Statistics of Aceh Regency. The data analysis method used is the Multiple Linear Regression analysis. The result partially shows that local taxes have a positive and significant effect on economic growth in North Aceh Regency, while government expenditures have a negative and significant effect on economic growth in North Aceh Regency. Simultaneously, local taxes and government spending have a significant effect on economic growth in the North Aceh Regency.

1. PENDAHULUAN

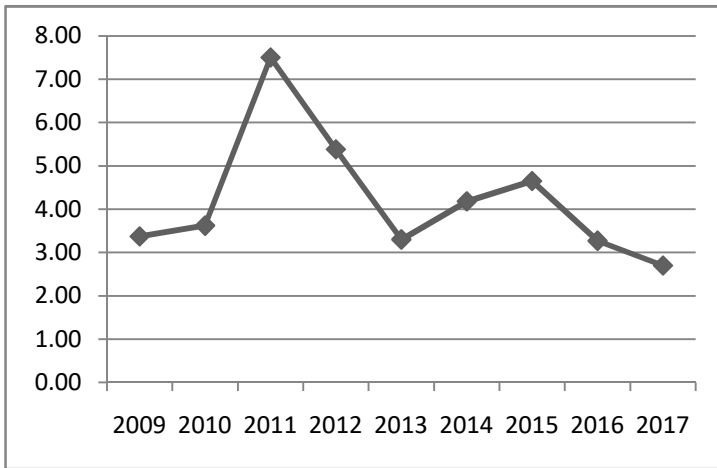
Pertumbuhan ekonomi ialah suatu gambaran nyata dari dampak sebuah kebijakan dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut diartikan sebagai pertumbuhan bentuk dari bermacam sektor pada ekonomi tidak secara langsung menjelaskan perubahan ekonomi. Bagi daerah, hal ini ialah suatu indikator yang begitu penting guna mengetahui keberhasilan dari pembangunan dan juga bermanfaat guna menentukan arah dari kebijakan pembangunan pada masa depan. (Prok, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara karena semakin tinggi pertumbuhan suatu Negara akan meningkatkan kenaikan output perkapita. Dan salah satu ciri kenaikan output perkapita adalah dengan semakin bertambahnya produksi dalam sektor industri. Artinya bahwa suatu Negara yang produksi barang industrinya meningkat Negara tersebut mempunyai pertumbuhan dari ekonomi yang meningkat pula (Margalita et al., 2015).

Kabupaten Aceh Utara ialah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara memiliki PDRB di peringkat pertama atau paling tinggi di seluruh Kabpaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp.

15.603.528,00, namun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar 1%. Permasalahan sosial yang timbul di masyarakat seperti kemiskinan dan lain-lain menjadi masalah yang sangat serius di setiap daerah, salah satunya dialami di Kabupaten Aceh Utara. Maka dengan itu untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Aceh Utara saat ini sedang giat-giatnya melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi di setiap wilayah adalah untuk membuat sejahtera masyarakatnya.

Akan tetapi jika dilihat dari realita di lapangan yaitu perkembangan dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Utara cenderung bergerak secara fluktuatif, yaitu bergerak naik dan turun. Laju dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara tidak selalu mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2012, 2013, 2016 dan 2017 laju dari pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, hal ini menandakan belum stabilnya laju dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada pada Aceh Utara lebih jelas bisa dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017

Sumber: BPS Aceh Utara, (2018)

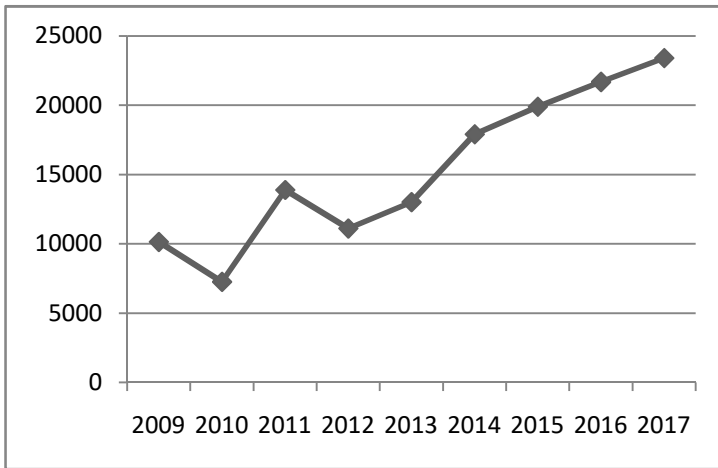
Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2009 adalah sebesar 3,37%, selanjutnya di tahun 2010 pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Aceh Utara meningkat menjadi 3,62%, kemudian pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah Kabupaten Aceh Utara meningkat menjadi 7,50%. Namun di tahun 2012 pertumbuhan dari ekonomi pada Kabupaten Aceh Utara terjadi penurunan menjadi 5,38% dan penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut terus terjadi hingga tahun 2013 menjadi 3,30%. Akan tetapi pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara kembali meningkat menjadi 4,18%, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara juga mengalami peningkatan menjadi 4,65%. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara kembali menurun menjadi 3,27%, pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 2,70%. Berdasarkan penjelasan pada gambar di atas bisa dilihat pergerakan dari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara bergerak secara fluktuatif.

Salah satu faktor yang nantinya dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga pembangunan di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi ialah dengan sumber pembiayaan yang potensial dari pendapatan daerah yaitu salah satu komponen dari PAD yaitu pajak daerah yang nantinya anggaran tersebut digunakan untuk pendanaan pemerintah dalam penerapan desentralisasi fiskal guna meningkatkan

pertumbuhan dari ekonomi pada suatu wilayah. Hal tersebut juga tertuang dalam UU No. 22 (1999) tentang perimbangan dari keuangan antara daerah dan pusat yang diberlakukan pada Januari (2001) (UU ini di dalam perkembangannya kemudian diperbarui dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 dan juga UU No. 33 Tahun 2004).

Otonomi daerah dirancang untuk mempercepat adanya pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan pada daerah yang diharapkan dari pemerintah di daerah guna terlaksananya pembangunan di daerah ialah fasilitas, pemerintah harus kreatif, politik lokal yang stabil, jaminan kesinambungan berusaha, komunikatif, yang utama bagi pembangunan daerah ialah penciptaan lapangan kerja. Setelah diperlakukannya otonomi daerah, PAD yang mempunyai komponen pendapatan pajak daerah ialah tolak ukur yang penting dalam implementasi otonomi di daerah dan mencerminkan otonomi daerah. Meskipun pendapatan tersebut tidak semuanya bisa membiayai total dari program-program daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun proporsi PAD atas total dari pendapatan daerah melalui retribusi daerah, pajak daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan pada daerah yang sudah dipisahkan dan juga lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah tetap ialah indikasi dari derajat kemandirian keuangan di suatu pemerintah daerah. (Halim dalam Damaningrum, 2015).

Dengan melalui otonomi di daerah dan juga desentralisasi fiskal baik pemerintah di daerah guna mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi, pemerintah daerah mempunyai wewenang guna menggali lagi pendapatan dan juga melakukan alokasi dengan mandiri di dalam menentukan prioritas bagi pembangunan. Dengan ada otonomi di daerah dan juga desentralisasi fiskal diharapkan bisa lebih menyamakan pembangunan yang sesuai keinginan dari daerah guna mengembangkan daerah menurut potensinya masing-masing. Untuk melihat perkembangan pajak daerah yang berada di Aceh Utara lebih jelas bisa dilihat pada Gambar 2 berikut.



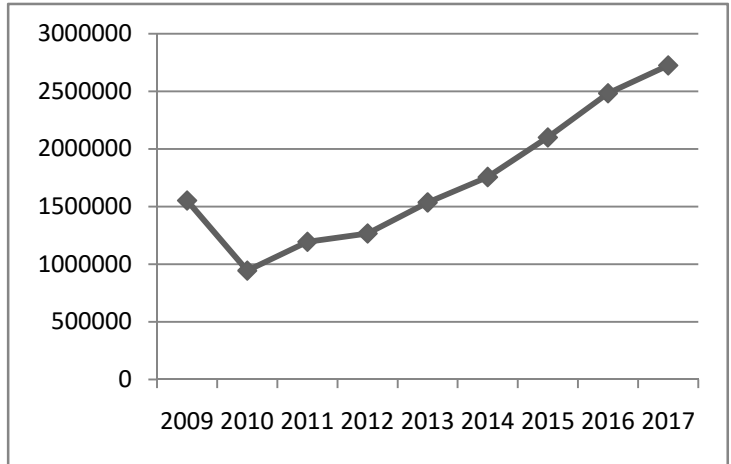
Gambar 2. Perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017

Sumber: BPS Aceh Utara (2018)

Berdasarkan perkembangan pajak daerah yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 10.130.342.000, selanjutnya di tahun 2010 pajak daerah yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan menjadi Rp. 7.253.679.000, kemudian pada tahun 2011 pajak daerah yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara terjadi peningkatan menjadi Rp. 13.876.066.000, namun pajak daerah yang ada di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Rp. 11.099.944.000. Akan tetapi di tahun 2013 pajak daerah kembali terjadinya peningkatan menjadi Rp. 12.997.494.000, dan peningkatan pajak daerah ini terus terjadi hingga tahun 2017 menjadi Rp. 23.386.309.000. Dengan melihat perkembangan pajak daerah yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara terlihat dari tahun ke tahun perkembangan pajak daerah yang di Kabupaten Aceh Utara terus cenderung bergerak fluktuatif, walaupun di tahun-tahun terakhir pajak daerah bergerak secara positif.

Untuk melancarkan penerapan pemerintahan di daerah dan juga pembangunan di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan anggaran untuk pembiayaan tersebut. Maka dengan itu besarnya sumber dari pendapatan daerah tersebut juga harus dibarengi dengan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Dengan begitu, diharapkan dari pengeluaran yang diimplementasikan pemerintah di daerah akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian daerah untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan di suatu wilayah guna melahirkan kesejahteraan dari masyarakat tersebut

sangat bergantung dari Pemerintah di Daerah dalam mengalokasikan pengeluarannya pada program dan juga aktivitas yang bertujuan guna kepentingan publik, sehingga bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat (Damaningrum, 2015). Untuk melihat perkembangan dari pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Utara lebih jelas bisa dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017

Sumber: BPS Aceh Utara (2018)

Berdasarkan perkembangan dari pengeluaran pemerintah yang berada di Kabupaten Aceh Utara pada Gambar 3 bahwa pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.551.692.963.000, selanjutnya di tahun 2010 pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Utara terjadi penurunan menjadi Rp. 944.443.421.000, kemudian pada tahun 2011 pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Utara terjadi peningkatan menjadi Rp. 1.194.433.066.000, di tahun 2012 pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Utara terjadi peningkatan menjadi Rp. 1.265.839.550.000. Peningkatan akan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Utara ini terus terjadi hingga tahun 2017 menjadi Rp. 2.723.717.320.000. Dengan melihat perkembangan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Utara terlihat dari tahun ke tahun perkembangan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Utara bergerak fluktuatif, walaupun penurunan pengeluaran pemerintah hanya terjadi pada tahun 2010 saja, namun di tahun-tahun terakhir pengeluaran pemerintah bergerak secara positif.

Dengan melihat perkembangan pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah di Aceh Utara pada tabel di atas bisa dilihat bahwa setiap peningkatan dari realisasi penerimaan dari pajak daerah dan juga dari alokasi pengeluaran

pemerintah di Aceh Utara dari tahun ke tahun tidak selalu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini seperti yang terjadi di tahun 2013, tahun 2016 dan Tahun 2017 pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah meningkat akan tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Jika dicermati kembali hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak semua pendapatan daerah yang dipunyai oleh Kabupaten Aceh Utara dialokasikan atau dibelanjakan untuk program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan adanya alokasi pengeluaran pemerintah yang dibelanjakan yang tidak berkaitan dengan program-program untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Hal ini sepaham dengan teori atau referensi yang ada, menurut Berutu dalam Kaat et al., (2017) penerimaan di daerah yang dialokasikan ke dalam pengeluaran pemerintah bisa semakin terjadi peningkatan sepaham dengan adanya peningkatan perekonomian suatu Negara. Meskipun demikian peningkatan pengeluaran dari pemerintah yang bersumber dari penerimaan daerah belum tentu menjadi baik atas aktivitas ekonomi. Oleh karena itu sangat perlu dilihat efisiensi dari penggunaan pengeluaran pada pemerintah tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas artinya fenomena yang terjadi saat ini bahwa penerimaan melalui pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah ialah salah satu dari faktor yang bisa meningkatkan dari pertumbuhan ekonomi di Aceh Utara, namun faktor tersebut masih belum cukup untuk bisa meningkatkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang secara terus menerus. Hal ini dikarenakan pemerintah di Kabupaten Aceh Utara masih belum dapat mengalokasikan pendapatan daerah yang dipunyai secara efisien dan juga efektif terhadap pengeluarannya, seharusnya upaya ini perlu dilakukan oleh pemerintah yang ingin terus meningkatkan laju dari ekonomi bisa tercapai.

Mengenai pengaruhnya pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi pada penelitian penulis, hal ini sama dengan penelitian yang ditulis oleh Mononimbar et al., (2017) yang menyatakan pajak daerah tidak punya pengaruh signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun mengenai pengaruhnya pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada penelitian penulis, hal ini juga sepaham pada penelitian yang ditulis oleh Damaningrum (2015) yang menyatakan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Tetapi dalam penelitian Andriyani dan Nurmauliza (2018) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007-2016, berdasarkan dari hasil penelitian bahwa berpengaruh negatif atas pertumbuhan ekonomi, hal tersebut berbeda dari hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif atas pertumbuhan ekonomi.

Arina et al., (2019) meneliti tentang Pengaruh PAD, DAU, DBH dan juga DAK atas Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado, berdasarkan atas hasil penelitian bahwa PAD yang mempunyai komponen salah satunya ialah pajak daerah berpengaruh atas pertumbuhan ekonomi, hal tersebut berbeda dengan hasil dari penelitian bahwa pajak daerah tidak mempunyai pengaruh atas pertumbuhan ekonomi.

Dari penelitian tersebut sejauh yang penulis ketahui bahwa banyak yang meneliti dengan penelitian serupa pakai data tahun di bawah tahun 2017, yang menggunakan data terbaru hingga tahun 2018 ke atas masih sulit untuk dicari. Dari uraian telah dijelaskan, maka tujuan atas penelitian ialah “Mengetahui pengaruh pajak daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017”. Bagian kedua dari tulisan ini ialah kajian teoritis. Pada bagian ketiga dalam tulisan ini dipaparkan metode penelitian. Kemudian, hasil dan juga pembahasan dipaparkan dalam bagian ke empat. Selanjutnya di bagian ke lima penyampaian kesimpulan dan juga saran terhadap penelitian ini.

2. KAJIAN TEORITIS Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses peningkatan atas produksi dari barang dan juga jasa di dalam kegiatan dari ekonomi bagi masyarakat selama periode waktu tertentu. (Satuan Persen). Menurut Sukirno dalam Sari et al., (2016) pertumbuhan ekonomi artinya perkembangan dari kegiatan dalam ekonomi yang membuat barang dan juga jasa yang kemudian diproduksi ke dalam masyarakat nantinya akan bertambah dan juga kemakmuran masyarakat akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi menjadi target utama di dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi ialah indikator dari keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan. Pertumbuhan ekonomi bermanfaat guna menentukan arah dari pembangunan ke masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara ataupun daerah juga telah dipengaruhi atas SDA,

akumulasi modal, SDM baik jumlah maupun tingkat dari kualitas penduduknya, akses terhadap informasi, kemajuan teknologi mengembangkan diri dan juga budaya kerja serta keinginan guna melakukan inovasi (Todaro dalam Latuny, 2014).

Menurut Hidayat et al., (2011) pertumbuhan ekonomi artinya perkembangan dari kegiatan di dalam ekonomi yang membuat barang dan juga jasa yang kemudian diproduksi ke dalam masyarakatpun bertambah dan juga kemakmuran masyarakat bisa meningkat. Pertumbuhan ekonomi bisa dipandang sebagai permasalahan makro ekonomi jangka panjang. Atas periode ke periode kemampuan dari suatu negara guna menghasilkan dari barang dan juga jasa bisa meningkat. Kemampuan yang bisa meningkat ini dikarenakan faktor-faktor produksi selalu terjadinya penambahan di dalam jumlah dan juga kualitasnya. Tenaga kerja kemudian bertambah disebabkan perkembangan dari penduduk sejalan dengan peningkatan pendidikan dan juga keterampilan dari masyarakat tersebut. Pertumbuhan ekonomi ialah kunci daripada tujuan ekonomi makro. Hal itu disebabkan oleh 3 alasan utama. Pertama, penduduk akan selalu bertambah. Kedua, selama kebutuhan dan juga keinginan selalu tidak mempunyai terbatas, perekonomian juga harus selalu bisa memproduksi yang lebih besar pada barang dan juga jasa guna memenuhi dari kebutuhan dan juga keinginan. Ketiga, usaha guna terjadinya pemerataan ekonomi dari retribusi pendapatan yang kemudian jauh lebih mudah untuk dicapai ke dalam periode pada pertumbuhan dari ekonomi yang sering tinggi.

Pada umumnya ekonom memberikan arti yang sama pada pertumbuhan dan juga pada pembangunan ekonomi. Ekonom telah mengartikan pertumbuhan ataupun pembangunan ekonomi dengan kenaikan pada GDP ataupun GNP. Dalam artian yang luas, pertumbuhan ekonomi dipakai guna menyatakan perkembangan pada negara-negara maju. Sedangkan pembangunan ekonomi dipakai guna menyatakan perkembangan pada negara yang sedang berkembang (Arsyad dalam Ervani, 2008).

Husna dan Sofia (2013) meneliti tentang Pengaruh PAD Dan juga Dana Perimbangan atas Pertumbuhan Ekonomi di Dalam Pengembangan Wilayah pada Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil dari penelitian retribusi daerah dan juga DAU berpengaruh dan juga signifikan atas pertumbuhan ekonomi pada wilayah Kabupaten Bintan, sedangkan dari DAK, lain-lain dari pendapatan sah dan juga DBH tidak adanya pengaruh dan juga signifikan atas

pertumbuhan dari ekonomi pada wilayah Kabupaten Bintan.

Kusumawati dan Wiksuana (2018) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Daerah atas Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. . Dalam penelitian tersebut memakai data sekunder dengan bentuk *time series* dan metode analisis yang digunakan ialah metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian PAD dan juga DAK punya pengaruh dan positif atas pertumbuhan dari ekonomi pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Sedangkan dari DAU dan juga DBH mempunyai pengaruh dan negatif atas pertumbuhan dari ekonomi pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali.

Kaat et al., (2017) meneliti tentang Pengaruh PAD dan juga Dana Perimbangan atas Pertumbuhan Ekonomi dan juga Dampaknya atas Kemiskinan Di Kota Bitung. Dalam penelitian tersebut memakai data sekunder dengan bentuk data panel dan metode analisis yang dipakai ialah metode analisis path atau analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian bahwa PAD punya pengaruh dan negatif atas pertumbuhan dari ekonomi, tetapi tidak punya pengaruh signifikan. Dana perimbangan mempunyai pengaruh dan positif atas pertumbuhan dari ekonomi tetapi tidak punya pengaruh signifikan.

Pajak Daerah

Kesit dalam Wola et al., (2016) menyatakan pajak daerah ialah iuran wajib yang dilaksanakan oleh badan ataupun orang pribadi tanpa imbalan secara langsung yang juga seimbang, yang bisa dipaksakan berdasarkan dari UU yang berlaku, yang kemudian hasilnya dipakai guna mendanai pelaksanaan pemerintahan di daerah dan juga pembangunan di daerah. Mardiasmo dalam (Wola et al., 2016) yang dimaksud dengan pajak daerah ialah pajak yang dikumpulkan daerah berdasarkan dari peraturan pajak yang telah ditetapkan daerah guna kepentingan pendanaan rumah tangga dari pemerintah di daerah tersebut.

Munurut UU No. 28 pada tahun 2009 dalam Fahmi et al., (2015) tentang Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah yaitu sumber dari pendapatan pajak daerah yang didapatkan dari pajak Kota/Kabupaten yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak reklame, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan juga perkotaan, dan juga bea perolehan atas hak tanah dan juga bangunan. Dengan mengidentifikasi potensi sektor dari pajak daerah

ditujukan untuk dapat mengoptimalkan sektor ini dalam pendanaan pembangunan pada daerah.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dalam Dewi dan Budhi (2018) dijelaskan pajak itu wajib namun siapapun yang dikenakan pajak tidak bebas memilih apakah harus membayar atau tidak. Salah satu pengertian pajak sebagaimana pendapat Mangkoesobroto dalam Dewi dan Budhi (2018), yang berupa pungutan hak preogratis yang dilaksanakan pemerintah sesuai Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan pada wajib pajak tanpa ada balas jasa langsung penggunaannya dan dipakai untuk mendanai pelaksanaan pemerintah di daerah dan juga pembangunan daerah". Selain itu, menurut Suandy dalam Dewi dan Budhi (2018) menjelaskan pajak daerah ialah pajak yang mempunyai wewenang atas pengumpulannya ada pada Pemerintah di Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Menurut Asmuruf et al., (2015) pajak daerah yang identik dengan pajak memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yaitu pajak daerah ialah salah satu andalan pendapatan asli daerah disamping Retribusi daerah, hasil dari Pengelolaan Kekayaan di Daerah Lainnya yang telah dipisahkan dan juga Hasil Perusahaan Milik Daerah.

Saragih (2018) meneliti tentang Pengaruh Penerimaan Pajak atas Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Berdasarkan hasil bahwa penerimaan pajak di provinsi punya pengaruh positif dan juga signifikan atas pertumbuhan dari ekonomi di seluruh provinsi Indonesia pada periode 2013-2016. Implikasi daripada temuan ini ialah mampu meningkatkannya pertumbuhan dari ekonomi di suatu daerah, diperlukan dukungan dan juga kesinambungan dari pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah baiknya dimanfaatkan guna mendanai proyek yang produktif sehingga bisa mempercepat adanya pertumbuhan dari ekonomi.

Anggarini (2018) meneliti tentang Pengaruh Total Pendapatan di Daerah dan juga Pajak Daerah atas Lajunya Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Lampung. Dalam penelitian tersebut memakai data sekunder dan metode analisis yang dipakai ialah metode analisis ECM (*Error Correction Model*). Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa total dari pendapatan di daerah dan juga pajak daerah punya pengaruh dan juga signifikan atas pertumbuhan ekonomi yang berada di Provinsi Lampung, baik itu secara parsial ataupun simultan.

Handayani (2015) meneliti tentang Analisis Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan juga

Tenaga Kerja atas Pertumbuhan dari Ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Sragen pada Tahun 1995-2013. Dalam penelitian tersebut memakai data sekunder dengan bentuk *time series* dan metode analisis yang digunakan ialah metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil menunjukkan maka pajak daerah punya pengaruh signifikan atas pertumbuhan dari ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Sragen. Retribusi daerah tidak punya pengaruh signifikan atas Pertumbuhan dari Ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Sragen. Tenaga Kerja tidak punya pengaruh signifikan atas Pertumbuhan dari Ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Sragen.

Pengeluaran Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 dalam Wola et al., (2016) belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan yang wajib dan juga urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pelaksanaan urusan wajib tersebut diprioritaskan guna melindungi dan juga meningkatkan kualitas dari kehidupan masyarakat di dalam upaya memenuhi kewajibannya di daerah yang dicapai ke dalam bentuk adanya peningkatan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak serta bisa mengembangkan sistem dari jaminan sosial. Penyelenggaraan urusan wajib ini dimaksud berdasarkan dari Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja di setiap belanja, baik itu di dalam konteksnya daerah, satuan kerja dari perangkat di daerah, maupun kegiatan dan program, yang tujuannya guna meningkatkan akuntabilitas dari perencanaan anggaran dan juga memperjelas efektifitas dan juga efisiensi dari penggunaan anggaran itu sendiri. Kegiatan dan juga program haruslah memberikan informasi jelas dan juga terukur serta mempunyai hubungan langsung dengan pengeluaran yang nantinya diharapkan atas kegiatan dan juga program dimaksud bisa ditinjau dari aspek tolak ukur, indikator dan juga target kerjanya.

Belanja pemerintah ialah sekumpulan produk yang sudah dihasilkan dan juga memuat pilihan ataupun keputusan yang sudah dibuat pemerintah guna menyediakan barang publik dan juga pelayanan pada masyarakat. Total dari pengeluaran pemerintah ialah penjumlahan dari

keseluruhan keputusan anggaran di masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-daerah). Di masing-masing tingkatan ke dalam pemerintahan ini bisa memiliki keputusan akhir-proses pembuatan yang mempunyai perbedaan dan juga hanya beberapa hal saja pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi. (Lee dan Johnson dalam Tumbel et al., 2018).

Menurut Mankiw dalam Koyongian et al., (2017) pengeluaran pemerintah ialah salah satu dari komponen di dalam permintaan agregat, sebab apabila pengeluaran pemerintah bisa meningkat maka permintaan agregat bisa meningkat. Selain itu peranan pengeluaran pemerintah pada negara yang sedang berkembang signifikan mengingat dari kemampuan di sektor swasta guna mendorong laju pertumbuhan dari ekonomi yang masih terbatas, sehingga peranan pemerintah masih sangat penting dalam perekonomian. Peningkatan permintaan berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi bisa diukur dari PDB.

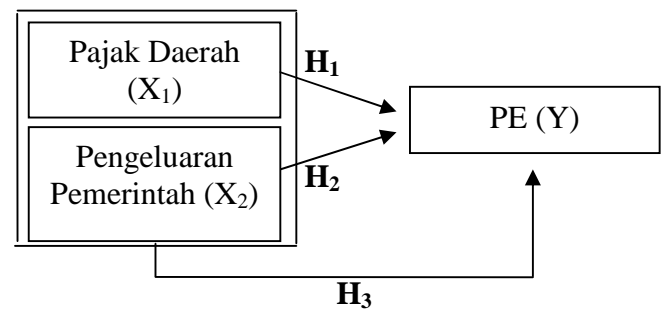
Buana et al., (2018) meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011 – 2015. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis bahwa pengeluaran dari pemerintah, tenaga kerja dan juga investasi swasta berpengaruh positif atas pertumbuhan dari ekonomi di pulau Jawa. Pengaruh semua variabel bebas atas variabel terikat ialah sebesar 97% dan juga sisanya sebesar 3% ialah pengaruh dari variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Sedangkan korelasi seluruh variabel independen dengan variabel dependennya menunjukkan korelasi yang tinggi yaitu sebesar 0,989.

Anitasari dan Soleh (2015) meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian tersebut memakai data sekunder dengan bentuk *time series* dan metode analisis yang digunakan ialah metode analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil pengaruh pengeluaran dari pemerintah atas pertumbuhan dari ekonomi di kabupaten/kota bahwa jumlah 10 kabupaten/kota pada Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu dan juga Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai hasil bahwa pengeluaran dari pemerintah berpengaruh yang positif dan juga signifikan atas pertumbuhan dari ekonomi di daerahnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki pengaruh yang negatif sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun tidak

signifikan. Sebagian besar dari kabupaten di Provinsi Bengkulu digolongkan sebagai daerah yang masih baru membangun yang hasil dari pemekaran pasca diberlakukan otonomi di daerah. Sehingga pada jangka pendek pengeluaran dari pemerintah dirasa belum bisa menstimulus kegiatan dari sektor-sektor ekonomi serta menunjang pertumbuhan dari ekonomi di daerah tersebut.

Bawinti et al., (2018) meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan dari Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam penelitian tersebut memakai data sekunder dengan bentuk *time series* dan metode analisis yang digunakan ialah metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil bahwa Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh atas Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Investasi Swasta tidak mempunyai pengaruh atas Pertumbuhan dari Ekonomi. Secara simultan Pengeluaran dari Pemerintah dan juga Investasi Swasta mempunyai pengaruh atas Pertumbuhan Ekonomi.

Kerangka Konseptual



Gambar 4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Gambar 4 di atas, kerangka konseptual pada penelitian ini bisa dijelaskan, bahwa apakah pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah punya pengaruh dengan pertumbuhan dari ekonomi yang berada di Kabupaten Aceh Utara. Dalam penelitian ini memakai pengujian uji t dan uji simultan atau uji f, dimana uji t yaitu pengujian secara perindividu dan bersama-sama guna mengetahui atas pengaruh dari variabel bebas ataupun independen atas variabel terikat ataupun dependen.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian disusun atas gambaran kerangka pikir yang ialah jawaban awal atas permasalahan yang disusun. Melihat perkembangan Pajak Daerah dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara, maka penulis merumuskan hipotesis ialah sebagai berikut:

- H₁: Diduga pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017.
- H₂: Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017.
- H₃: Diduga pajak daerah dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian penulis yang menjadi objek penelitian ialah pertumbuhan ekonomi, pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah. Sedangkan lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara. Desain penelitian dilakukan dengan model analisis regresi linear berganda dan memakai data sekunder dengan jenis data time series yang diambil dari periode tahun 2009 hingga tahun 2017. Data-data tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Aceh Utara. Adapun data yang dipakai pada penelitian penulis ialah data pertumbuhan ekonomi, pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah.

Definisi Operasional Variabel

1. **Pertumbuhan Ekonomi**
Suatu proses dari peningkatan produksi dari barang dan juga jasa di dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Utara. (Dalam Satuan Persen).
2. **Pajak Daerah**
Pendapatan daerah yang asalnya dari iuran wajib oleh individu ataupun badan di Kabupaten Aceh Utara tanpa adanya imbalan secara langsung, guna membiayai roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara dan juga pembangunan di Kabupaten Aceh Utara. (Dalam Satuan Rupiah).
3. **Pengeluaran Pemerintah**
Pengeluaran dalam bentuk uang ataupun dana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam periode tahun tertentu untuk pembelian barang jasa guna memenuhi pelayanan publik guna mendorong adanya

pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara. (Dalam Satuan Rupiah).

Metode Analisis Data

Metode dari analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif yaitu dalam pengambilan data secara statistik untuk mempermudah perhitungannya dengan menggunakan data-data statistik. Untuk mengukur pengaruh pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara digunakan model regresi linier berganda. Penggunaan regresi linier berganda ini dilakukan berdasarkan asumsi dasar bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh variabel yaitu: pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah. Adapun formulasi model regresi linier berganda dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan ekonomi
 β_0 = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel
 X_1 = Pajak Daerah
 X_2 = Pengeluaran Pemerintah
 e = *Error term* (Variabel pengganggu)

Uji Normalitas

Uji normalitas tujuannya guna menguji apakah pada dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu terdistribusi normal. Apabila terdapat normalitas, maka residual berdistribusi normal dan juga independen, yaitu ialah perbedaan antar nilai prediksi dengan skor yang sebenarnya ataupun error akan terdistribusi simetri yang di sekitar dari nilai means sama juga dengan nol. Uji normalitas data, guna melihat normalitas residual peneliti melihat dengan Jarque-Bera. Menurut Mahardika dan Artini (2017) normalitas dapat dideteksi dengan menyesuaikan nilai Jarque Bera dengan tingkat alpha 0,05, data dapat dikatakan residual berdistribusi normal apabila probalitas > 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Menurut Aryanto dan Handaka (2017) uji autokorelasi merupakan pengujian untuk mengetahui apakah di dalam model regresi linear adanya hubungan antara kesalahan pengganggu di periode t dengan kesalahan pengganggu di periode t-1 ataupun periode sebelumnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini memakai uji *Breusch-Godfrey*

Serial Correlation LM Test, dengan melihat nilai *p-value* dari observasi R^2 . Dengan demikian jika *p-value* Observasi $R^2 > 0,05$ maka tidak terdapat autokorelasi, namun jika terjadi sebaliknya *p-value* Observasi $R^2 < 0,05$ maka terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali dalam Haslinda dan Jamaluddin (2016) uji multikolinieritas dipakai guna mengetahui apakah adanya hubungan ataupun korelasi antara variabel bebas. Multikolinieritas menjelaskan hubungan antara sesama dari variabel bebas. Model regresi yang bagus sebaiknya tidak terjadi hubungan/korelasi antara variabel bebas. Menurut Iqbal (2015) multikolinearitas bisa dideteksi dengan melihat nilai dari *centered VIF* dengan pengujian *variance inflation factor*, jika nilai *Variance Inflation Factor* tidak lebih dari 10, maka model tersebut bisa dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

Uji Hipotesis

Uji t

Menurut Kriteria penilaian dengan metode ini adalah jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka hipotesis penelitian diterima, dan juga sebaliknya. Menurut Ghazali dalam Galatang et al., (2016) uji t dasarnya menggambarkan seberapa jauh dari pengaruh variabel bebas secara individual di dalam menggambarkan variabel terikat. Pengujian dilaksanakan dengan memakai signifikan level 0,05 ($=5\%$). Penerimaan ataupun penolakan hipotesis dilaksanakan dengan kriteria : Jika nilai itu tidak signifikan $> 0,05$ maka hipotesis tersebut ditolak. Artinya secara parsial/uji t variabel bebas ini tidak mempunyai pengaruh signifikan atas variabel terikat. Jika nilai itu signifikan $0,05$ maka hipotesis tersebut diterima. Artinya secara parsial/uji t variabel bebas tersebut memiliki pengaruh signifikan atas variabel terikat.

Uji F

Menurut Ghazali dalam (Galatang et al., (2016) uji statistik F dasarnya menunjukkan apakah seluruh variabel bebas yang sudah dimasukkan pada model memiliki pengaruh secara bersama-sama kepada variabel terikat. Metode penelitian secara simultan yang dipakai pada penelitian ini ialah menggunakan nilai $Sig < ,$ atau bisa dengan F_{hitung} dibandingkan dengan nilai F_{tabel} . Kriteria penilaian Uji F adalah jika nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ; $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis penelitian diterima, dan sebaliknya. Uji statistik F : Taraf signifikan $= 0,05$. Hal ini artinya secara simultan variabel-variabel

independen atau bebas mempunyai pengaruh signifikan kepada variabel terikat/dependen dan begitu juga sebaliknya.

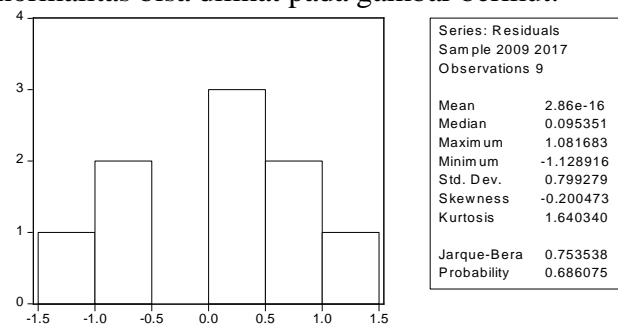
Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali dalam Jayantara dan Dharmadiaksa (2016) koefisien determinasi (R^2) intinya guna mengukur sejauhmana kemampuan model saat menggambarkan variasi dari variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ialah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan dari variabel-variabel bebas/independen dalam menggambarkan variasi dari variabel terikat sangatlah terbatas. Nilai yang dekat dengan satu artinya variabel-variabel bebas/independen ini menyerakan hampir seluruh informasi yang diperlukan guna memprediksi variasi dari variabel terikat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas tujuannya guna menguji apakah pada dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu terdistribusi normal. Menurut Mahardika dan Artini (2017) normalitas bisa ditemukan dengan menyesuaikan nilai Jarque Bera dengan tingkat alpha 0,05, data dapat dikatakan residual berdistribusi normal apabila probabilitas $> 0,05$. Untuk melihat hasil uji normalitas bisa dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Uji Normalitas

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2020)

Dengan melihat tampilan gambar histogram bisa disimpulkan kalau model regresi telah memenuhi asumsi dari normalitas karena pada nilai probability $0.686075 > 0,05$. Maka bisa disimpulkan kalau data pada penelitian ini sudah baik dikarenakan variabel residual telah terdistribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Autokorelasi

Menurut Aryanto dan Handaka (2017) uji autokorelasi merupakan pengujian untuk mengetahui apakah di dalam model regresi linear

adanya hubungan antara kesalahan pengganggu di periode t dengan kesalahan pengganggu di periode $t-1$ ataupun periode sebelumnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini memakai uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*, dengan melihat nilai p -value dari observasi R^2 . Dengan begitu jika p -value Observasi $R^2 > 0,05$ maka tidak mempunyai autokorelasi, namun jika terjadi sebaliknya p -value Observasi $R^2 < 0,05$ maka ada mempunyai autokorelasi.

Tabel 1
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test			
F-statistic	0.605694	Prob. F(2,5)	0.5891
Obs*R-squared	2.092052	Prob. Chi-Square(2)	0.3513

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2020)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared untuk hasil adalah sebesar 2.092052. Karena nilai Obs*R-squared (2.092052) $> 0,05$ maka bisa disimpulkan jika data pada penelitian ini sudah baik dikarenakan sudah terbebas dari gejala autokorelasi..

Hasil Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali dalam Haslinda dan Jamaluddin (2016) uji multikolinieritas dipakai guna mengetahui apakah adanya hubungan ataupun korelasi antara variabel bebas. Multikolinieritas menjelaskan hubungan antara sesama variabel bebas. Model regresi yang bagus sebaiknya tidak ada kolerasi antara variabel bebas. Menurut Iqbal (2015) multikolinieritas bisa ditemukan dengan cara melihat nilai dari centered VIF dengan pengujian VIF, jika nilai VIF kurang dari nilai 10, maka model tersebut bisa dibuang terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.981207	10.36734	NA
X_1	2.56E-20	71.41146	7.530472
X_2	2.23E-24	77.81147	7.530472

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2020)

Berdasarkan Tabel 2, nilai Centered VIF variabel pajak daerah sebesar 7.530472 dan nilai Centered VIF variabel pengeluaran pemerintah adalah sebesar 7.530472. Hal ini menjelaskan antara variabel independen/bebas tidak terjadinya multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai Centered VIF variabel pajak daerah dan juga

pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 7.530472 < 10 .

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang ada, maka peneliti melaksanakan analisis regresi linear berganda antara variabel bebas/independen dan juga dependen/terikat pada penelitian ini. Dimana yang menjadi variabel dependen adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Sementara yang menjadi variabel bebas ialah Pajak Daerah (X_1) dan juga Pengeluaran Pemerintah (X_2). Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini bisa dilihat output regresi linear berganda (*multiple regression linear*) dengan memakai program Eviews dan akan ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	6.181122	6.240034	0.0008
X_1	4.88E-10	3.049302	0.0225
X_2	-5.47E-12	-3.667975	0.0105
R-squared	0.706821	Prob (Fstatistic)	0.025200
Adjusted R-squared	0.609095	T_{tabel}	2.447
Fstatistic	7.232660	F_{tabel}	5.14

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2020)

Berdasarkan data dari tabel di atas apabila dimasukkan pada model penelitian, maka persamaan dari regresi linear berganda (*multiple regression linear*) ialah sebagai berikut:

$$Y = 6.181122 + 4.8810X_1 - 5.4712X_2$$

Dari persamaan model regresi di atas maka hasil dari penelitian bisa dinyatakan sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 6.181122 yang bahwa jika dari variabel pajak daerah (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_2) dimasukkan pada penelitian ini, maka pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 6,18%. Selanjutnya diketahui nilai koefisien pajak daerah (X_1) adalah sebesar 4.8810, artinya jika pajak daerah meningkat 1% maka pertumbuhan dari ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Utara akan mengalami kenaikan sebesar 4,88%. Kemudian diketahui nilai koefisien pengeluaran pemerintah (X_2) adalah sebesar -5.4712, artinya jika pengeluaran pemerintah terjadi peningkatan 1% maka pertumbuhan dari ekonomi yang ada pada daerah Kabupaten Aceh Utara akan mengalami penurunan sebesar -5,47%. Peningkatan pengeluaran pemerintah bersifat negatif atas pertumbuhan dari ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Utara dikarenakan pengalokasian pengeluaran pemerintah

dikeluarkan secara tidak efektif dan efisien serta tidak tepat sehingga pengeluaran pemerintah menjadi negatif atas pertumbuhan dari ekonomi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t

Dari hasil pengujian sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 3 maka bisa dilihat kalau pajak daerah (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.049302 > 2.447$ dengan nilai signifikansi $0.0225 < 0,05$, berarti secara parsial pajak daerah (X_1) berpengaruh dengan signifikan atas pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-3.667975 > 2.447$ dengan nilai signifikansi $0.0105 < 0,05$, berarti secara parsial pengeluaran dari pemerintah (X_2) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara.

Hasil Uji F

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terdapat di Tabel 3, maka bisa dilihat kalau pajak daerah (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_2) memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $7.232660 > 5.14$ dengan nilai signifikansi sebesar $0.025200 < 0,05$, berarti secara serempak atau bersama-sama pajak daerah (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini sepaham pada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Damaningrum (2015), bahwa pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah secara simultan mempunyai pengaruh dengan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian yang ada di Tabel 3 bahwa nilai dari R-squared sebesar 0.706821 yang artinya pengaruh variabel pajak daerah (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_2) atas pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 0.706821 atau 70,68%, sementara sisanya yaitu 29,32% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil dari pengujian bahwa pajak daerah (X_1) berpengaruh dengan signifikan atas pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini digambarkan dengan nilai $t_{hitung} >$

t_{tabel} yaitu $3.049302 > 2.447$ dengan nilai signifikansi $0.0225 < 0,05$. Hal ini sepaham pada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Damaningrum (2015), bahwa pajak daerah yang ialah salah satu dari komponen Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh dengan signifikan dan juga positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Dewi dan Budhi (2018) dengan adanya pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah maka perekonomian dan pembangunan di suatu daerah akan berjalan dengan lancar serta dapat mendorong adanya pertumbuhan di sektor swasta dan juga rumah tangga saat mengalokasikan sumber daya di suatu daerah yang akan menyebabkan semakin meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian bahwa pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh signifikan dan negatif atas pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini digambarkan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-3.667975 > 2.447$ dengan nilai signifikansi $0.0105 < 0,05$. Hal ini bisa terjadi dikarenakan alokasi pengeluaran pemerintah di Kabupaten Aceh Utara lebih besar dipakai untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah dan lain-lain yang pembiayaan tersebut kurang produktif sehingga tidak memberikan kontribusi yang positif guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Andriyani dan Nurmauliza (2018), bahwa pengeluaran dari pemerintah mempunyai pengaruh signifikan namun negatif atas pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara dan hal itu disebabkan oleh akumulasi pengeluaran pemerintah ternyata lebih besar dipakai guna belanja rutin, maka karena itu jumlah belanja pembangunan tidak mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian selanjutnya yang dilaksanakan oleh Soleh dan Anitasari dalam Andriyani dan Nurmauliza (2018) yang menunjukkan bahwa secara uji t/parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan dari ekonomi di Provinsi Bengkulu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial menyatakan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh dengan signifikan atas pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara.
2. Secara parsial menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian memberikan satu bukti bahwa pajak daerah ialah salah satu penerimaan dari di daerah yang sangat berpotensi menopang perkokonomian di Kabupaten Aceh Utara. Dikarenakan saat ini pajak daerah ialah salah dari komponen pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Utara ini sebagian dari penerimaan ini bisa dialokasikan kepada program-program yang berkaitan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dengan itu dirasa perlu sekali agar pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga dapat mengalokasikan penerimaan daerah lainnya untuk program-program yang berkaitan langsung terhadap peningkatan ekonomi, agar nantinya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.
2. Hasil penelitian memberikan satu bukti bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai potensi guna dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara. Maka dengan itu dirasa perlu sekali bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk efisien dan efektif dalam pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap program-program yang langsung berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan dari ekonomi, karena jika tidak maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara akan mengalami penurunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Pengaruh pajak daerah, jumlah penduduk dan pengeluaran dari pemerintah atas pertumbuhan ekonomi. Ada baiknya menambah variabel-variabel lain untuk diteliti, karena sebenarnya cukup banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pajak daerah, jumlah penduduk dan pemerintah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriyani, D., & Nurmauliza. (2018). Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007-2016. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(1), 8–14.
- [2] Anggarini, D. R. (2018). Pengaruh Total Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal Of Business*, 1(1), 1–4.
- [3] Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review*, 3(2), 117–127.
- [4] Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 1–11.
- [5] Aryanto, W., & Handaka, R. D. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 2(2), 52–63.
- [6] Asmuruf, M. F., Rumatte, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 727–737.
- [7] Bawinti, I., Kawung, G. M. V, & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(04), 23–33.
- [8] Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritonang, S. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 4(2), 1–20.

- [9] Damaningrum, A. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surakarta. *Artikel Publikasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–11.
- [10] Dewi, J. K., & Budhi, M. K. S. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1695–1722.
- [11] Ervani, E. (2008). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 1980.I – 2004.IV. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 7(2), 223–232.
- [12] Fahmi, R., Badjuri, & Jumiati, A. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013. *Karya Ilmiah Civitas Akademika Program Studi Ekonomi Pembangunan*, 1–7.
- [13] Galatang, J., Murni, S., & Baramuli, D. (2016). Analisis Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Return On Equity dan Risiko Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di BEI 2011-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 121–132.
- [14] Handayani, H. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sragen Tahun 1995-2013. *Jurnal Naskah Publikasi*, 1–11.
- [15] Haslinda, & Jamaluddin. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 2(1), 1–21.
- [16] Hidayat, M., Sari, L., & Aqualdo, N. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(4), 48–63.
- [17] Husna, A., & Sofia, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *JEMI*, 4(2), 1–12.
- [18] Iqbal, M. (2015). Pengolahan Data dengan Regresi Linier Berganda. *Modul Perbannas Institut Jakarta*, 1–27.
- [19] Jayantara, I. K., & Dharmadiaksa, I. B. (2016). Pengaruh Kemampuan Teknik Pemakai Dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kinerja Individual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2145–2170.
- [20] Kaat, M. H., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010–2015. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–18.
- [21] Koyongian, C. L., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 1–15.
- [22] Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(5), 2592–2620.
- [23] Latuny, E. M. (2014). Analisis Sektor Unggulan Di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, 8(2), 148–157.
- [24] Mahardika, I. N. F., & Artini, L. G. S. (2017). Pengaruh Rasio Pasar Dan Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(4), 1877–1905.
- [25] Margalita, W., Badjuri, & Komariyah, S. (2015). Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Jawa Timur Tahun 2007-2011 (Pendekatan Input-Output Analysis). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 1–4.
- [26] Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 48–59.

- [27] Prok, K. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Selama Periode Otonomi Daerah 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 1–15.
- [28] Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Indonesia. *SIKAP*, 3(1), 17–27.
- [29] Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 8(2), 1–19.
- [30] Tumbel, S. D. A., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(5), 1–15.
- [31] Utara, B. A. (2018). Kabupate Aceh Utara Dalam Angka 2018. *BPS Aceh Utara*, 1–517.
- [32] Wola, D. C., Saerang, D. P. E., & Walewangko, E. N. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Langsung dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung 2005-2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 1–16.